

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan tidak terlepas dari permasalahan yang ada di Indonesia yaitu sumber daya manusia yang ada di Indonesia masih minim, sehingga pendapatan dan kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan UMKM terbatas. Kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus diperhitungkan dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM merupakan isu yang perlu ditingkatkan dan telah berkontribusi penuh Dengan mendukung pembiayaan program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat yang sudah ada di Bank Indonesia Lakat sebelum merger dengan Bank Indonesia Syariah. Kredit Usaha Rakyat menyelesaikan permasalahan multi sektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Masalah kemiskinan hanya dapat diselesaikan jika pemerintah menerapkan kebijakan yang serius dan bersahabat terhadap keluarga miskin “(Muhammad Rifki Bayhaqi 2019, h.1)”

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mensejahterakan Masyarakat yang selalu mendapatkan kurang memuaskan, sehingga Pemerintah mengeluarkan kembali Kebijakan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kecil dengan usaha kecil dan menengah. Beberapa instansi terlibat dalam program peningkatan ekonomi masyarakat “(Maesya 2015,hlm3)”. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil Dan Menengah dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menanggulangi kemiskinan. pelaku Usaha Indonesia di kuasai oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha mikro, kecil dan menengah selamat dari krisis ekonomi 1997-1998 tanpa terpengaruh. Pasca krisis, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah tidak berkurang, tetapi bertambah, bahkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan distribusi produk konstruksi. 98% pelaku usaha Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil yang dapat memberikan kontribusi 57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja. Usaha mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi Indonesia). Menawarkan kesempatan kerja dan output manufaktur yang tinggi sebagai modal investasi yang rendah, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB), pengembangan sektor usaha mikro digunakan untuk menopang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil “(Mongkito et al. 2021, hlm 92)”.

Perkembangan UMKM di Indonesia terkait erat dengan kendala keuangan dari mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja, yang penting untuk pertumbuhan output jangka panjang. Masalah kekurangan modal seringkali menimbulkan kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh usaha mikro dan UKM dalam menjalankan usahanya. Keterbatasan ini mungkin disebabkan oleh lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha pedesaan dan kurangnya informasi

tentang pinjaman/pembiayaan yang ada. Dengan demikian, usaha mikro dan UKM kekurangan akses ke informasi dan kredit/pembiayaan, membatasi pertumbuhan dan peluang investasi “(Huda 2019, hlm. 8)”. Dengan berkembangnya UMKM, diharapkan mereka memiliki akses terhadap KUR yang beroperasi di sektor-sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan, perkapalan dan industri. Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan, karena kemiskinan merupakan masalah multisektoral dan individu bertanggung jawab kepada semua pihak. Agar pemerintah dapat bekerja sama dengan perbankan untuk menerapkan *Personal Credit Lending* (KUR) untuk UMKM.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank adalah badan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat secara kredit dan/atau sebaliknya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. dari masyarakat umum. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan atau kekurangan dana untuk usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Perbankan syariah yang dikenal secara internasional sebagai Islamic banking atau *Interest free banking*, adalah sistem perbankan yang tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakpastian atau ambiguitas (gharar) dalam operasionalnya. Bagi mereka yang memperhatikan ketiga faktor tersebut, perbankan syariah merupakan alternatif cara meminjam modal atau menginvestasikan

uang, dan berafiliasi dengan Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah. Selain itu, BRI Syariah merupakan penerima Alokasi Penyaluran KUR Mikro ketiga yang menunjukkan betapa mudahnya nasabah dalam mengajukan dana KUR Mikro Syariah. Tentu saja, sebagai salah satu bank syariah yang menyalurkan KUR, BRI Syariah berbeda dengan Bank penyalur KUR berbasis suku bunga lainnya dalam hal sistem akad, hukum yang digunakan, persyaratan penanganan dana, dll “(Huda. 2019, hlm 9)”

Bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H pada 1 Februari 2021, ini menandai sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Didukung sinergi dengan perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Syariah Indonesia didorong untuk berdaya saing global (BSI. 2022).

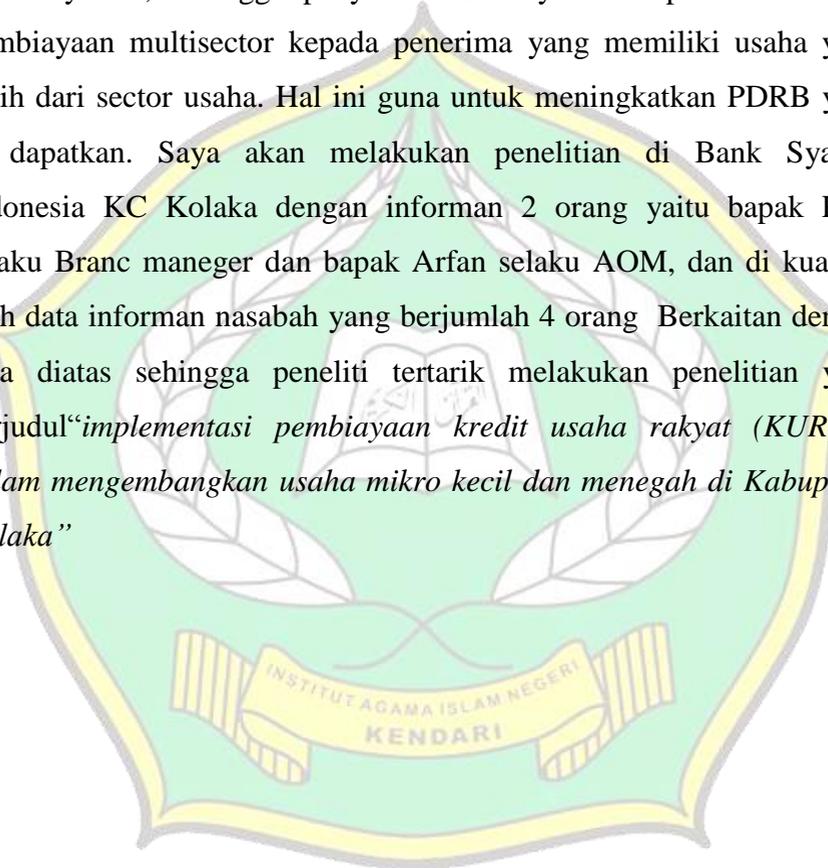
Bank Syariah Indonesia kantor cabang perwakilan Kolaka atau di sebut dengan BSI KCP kolaka yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang tentunya sangat mendukung akan pengembangan para pengusaha mikro, dukungan tersebut dapat teralisasi dengan mengeluarkan sebuah produk berupa pembiayaan bagi para pengusaha mikro dengan diberi nama unik mikro BSI iB yang bertujuan untuk kebutuhan modal atau investasi. Dengan adanya program pembiayaan (KUR) Bank Syariah Indonesia KC Kolaka, para pengusaha mikro dapat tambahan pinjaman sehingga dapat mengembangkan usahanya yang sudah berjalan sehingga Target

yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat dengan program KUR Bank Syariah Indonesia ini yakni semua kegiatan bisnis semua skala bisa mengakses permodalan. Dengan begitu semua arus perputaran barang dan jasa semakin lancar, sehingga membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kolaka.

Observasi awal peneliti mengungkapkan bahwa masyarakat kesulitan menghimpun dana dari Bank Syariah Indonesia di KC Kolaka. Permasalahannya, masih banyak Masyarakat di Kota Kolaka yang belum mengenal Bank Syariah Indonesia sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan Syariah. Bagi yang belum mengenal Bank Syariah Indonesia, tentunya mengambil pinjaman dari Bank Syariah Indonesia yang menggunakan sistem bagi hasil dengan akad Murabahah. Dan masi banyak masyarakat di kota kolaka mengambil pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia karna menurutnya pengambilan di Bank Rakyat Indonesia tidak terlalu ribet dan pencairan dana lancar walaupun dia mengentahui bunga angsuran tersebut.

Tujaun untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Perwakilan Kolaka (BSI) Kcp Kolaka yang merupakan suatu lembaga yang memiliki program pembiayaan untuk mendukung perkembangan UMKM di kota Kolaka. Bahwanya saya tertarik melakukan penelitian di BSI KCP kolaka. Keberadaan sektor UKM yang dijalankan oleh para pengusaha (pemilik usaha kecil) secara ekonomi lemah dan permasalahan yang mereka hadapi, terutama terkait dengan keterbatasan dana (modal terbatas), dan jumlah pengusaha yang layak mendapatkannya, kami melihat kemungkinan

yang besar. dikembangkan. Sehingga usaha mikro kecil dan menengah yang di harapkan dapat mengakses KUR Syariah yang bergerak di sector usaha produktif seperti pertanian, industri, pengelolaan, perikanan, jasa dan produksi. Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR Syariah, sehingga penyalur KUR Syariah dapat memberikan pembiayaan multisector kepada penerima yang memiliki usaha yang lebih dari sector usaha. Hal ini guna untuk meningkatkan PDRB yang di dapatkan. Saya akan melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Kolaka dengan informan 2 orang yaitu bapak Rudi selaku Branc manager dan bapak Arfan selaku AOM, dan di kuatkan oleh data informan nasabah yang berjumlah 4 orang Berkaitan dengan data diatas sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul *“implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR)BSI dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kolaka”*



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana Bank syariah Indonesia implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro BSI DI KCP kolaka?
2. Bagaimana dampak implementasi KUR BSI yang di lakukan BSI dalam pengembangan Usaha Mikro?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bank Syariah Indonesia implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro BSI DI KCP Kolaka?
2. Bagaimana dampak implementasi KUR BSI yang di lakukan BSI dalam pengembangan Usaha Mikro?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang perbankan syariah khususnya mengenai implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan usaha kecil, dan khususnya implementasi KUR Mikro Syariah dalam Islam. peran. Bank Pengembangan Usaha Mikro.

2. Manfaat praktis

Penjabaran skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat terkait pelaksanaan pembiayaan KUR mikro Syariah dan peran

KUR mikro Syariah bagi masyarakat, ulama, bank syariah dan khususnya penulis.

1.5. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi istilah dalam penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu:

a. Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan secara individu maupun berkelompok dalam pemerintahan atau swasta yang di kerahkan pada tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan oleh keputusan kebijakan serta menyelesaikan kebijakan yang telah di rancang sebelumnya. Secara sederhana implementasi bisa di artikan pelaksanaan atau penerapan. Hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya memberikan kebijakan implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat ke usaha mikro kecil dan menengah setelah usahanya berjalan selama 2 tahun. Pelaku usaha tersebut yang akan membuka lowongan pekerjaan yang dapat tingkat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

b. Pembiayaan KUR

Pembiayaan KUR adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di samakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan produktifas dan ekonomi umat sehingga adanya pembiayaan KUR dapat membuka lapangan kerja.

c. Dampak

Dampak adalah suatu tindakan yang merujuk hal negatif dan positif sebagai pengaruh atau akibat dalam mengambil sebuah keputusan. Dampak juga di artikan Seperti konflik atau pengaruh kuat, positif dan negatif, yang membawa manfaat dan kerugian bagi pelakunya.

d. UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan sebuah usaha produktif yang di miliki oleh perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sedangkan menurut UU NO 20 tahun 2008 pasal 1 ketentuan hokum tentang UMKM disebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

1.6. Sistematika Pembahasan

Bab satu Pendahuluan Pada bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan

Bab dua tinjauan Pustaka Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, dan kerangka pikir.

Bab tiga metodologi Penelitian Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan terakhir teknik analisis data.

Bab empat hasil Bab empat yakni hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan dan diolah berdasarkan pedoman penulisan Skripsi.

Bab lima Pada Bab lima membahas kesimpulan penelitian, saran dan limitasi penelitian.

